



## Kontribusi Daulah Umayyah terhadap Perkembangan Pendidikan dan Peradaban Islam

Irfan Maulana Adnan<sup>1</sup>, Sayyidah Haramaini<sup>2</sup>

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta<sup>1</sup>, UIN Sunan Ampel, Surabaya<sup>2</sup>, Indonesia

Email Korespondensi: [maherfanqis@gmail.com](mailto:maherfanqis@gmail.com)<sup>1</sup>, [sayyidahharamaini00@gmail.com](mailto:sayyidahharamaini00@gmail.com)

Article received: 26 September 2025, Review process: 07 Oktober 2025,

Article Accepted: 20 Oktober 2025, Article published: 27 Oktober 2025

### ABSTRACT

*This study examines the contribution of the Umayyad Caliphate to the development of Islamic education as a crucial phase in the history of Islamic civilization. This period demonstrates that education served as a fundamental basis for social, political, and intellectual progress within the Muslim community. The purpose of this study is to describe the role of the Umayyad Caliphate in establishing an organized educational system, developing institutions such as kuttab and mosques, and integrating religious and rational sciences within the curriculum. This research employs a qualitative descriptive method using a library research approach through the analysis of relevant classical and modern literature. The findings indicate that the Umayyad Caliphate successfully built a strong governmental and educational structure, expanded access to knowledge, and fostered an intellectual tradition open to diverse civilizations. Although it eventually declined due to internal conflicts and social disparities, its intellectual and educational legacy remained a vital foundation for the advancement of Islamic education in subsequent eras. The study provides theoretical implications for understanding the relationship between political authority and intellectual development in the history of Islamic education*

**Keywords:** Umayyad caliphate, islamic education, islamic civilization, intellectual tradition

### ABSTRAK

*Penelitian ini membahas kontribusi Daulah Umayyah terhadap perkembangan sistem pendidikan Islam sebagai salah satu fase penting dalam sejarah peradaban Islam. Periode ini menegaskan bahwa pendidikan menjadi fondasi utama bagi kemajuan sosial, politik, dan intelektual umat Islam. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peran Umayyad Caliphate dalam pembentukan sistem pendidikan yang terorganisir, pengembangan lembaga seperti kuttab dan masjid, serta integrasi antara ilmu keagamaan dan ilmu rasional dalam kurikulum pembelajaran. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis literatur klasik dan modern yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Daulah Umayyah berhasil membangun struktur pemerintahan dan pendidikan yang kuat, memperluas akses terhadap ilmu pengetahuan, serta menumbuhkan tradisi intelektual yang terbuka terhadap peradaban lain. Meskipun pada akhirnya mengalami kemunduran akibat konflik internal dan kesenjangan sosial, warisan keilmuan dan sistem pendidikannya tetap menjadi pijakan bagi perkembangan pendidikan Islam pada masa berikutnya. Temuan ini memberikan implikasi teoretis bagi kajian sejarah pendidikan Islam, khususnya dalam memahami relasi antara kekuasaan politik dan perkembangan intelektual*

**Kata Kunci:** Daulah Umayyah, Pendidikan Islam, Peradaban Islam, Tradisi Keilmuan

## PENDAHULUAN

Kajian tentang sejarah peradaban Islam memiliki urgensi yang tinggi karena menjadi dasar pemahaman terhadap perkembangan sosial, politik, dan pendidikan umat Islam dari masa ke masa. Peradaban Islam memiliki hubungan yang sangat erat dengan dunia Islam, di mana perkembangan nilai, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam masyarakat Muslim saling berkelindan membentuk identitas peradaban yang berkelanjutan. Melalui sejarah, dapat dipahami bagaimana nilai-nilai keagamaan, moral, dan kebudayaan membentuk struktur peradaban Islam yang berkelanjutan (Usman dkk., 2021). Salah satu fase penting yang berkontribusi besar terhadap kemajuan tersebut adalah masa Daulah Umayyah, yang menandai transisi dari kepemimpinan khulafaur rasyidin menuju sistem pemerintahan yang lebih terorganisir secara politik dan administratif.

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena melalui pendidikan manusia dapat mencapai derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya (Adnan dkk., 2025). pentingnya pendidikan tidak hanya diakui secara rasional oleh manusia, tetapi juga ditegaskan secara ilahiah dalam Al-Qur'an. Islam memandang ilmu sebagai jalan untuk meningkatkan derajat dan kemuliaan manusia di sisi Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Apabila dikatakan, "Berdirilah," (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (Q.S Al-Mujadilah Ayat 11)

Meskipun nilai-nilai pendidikan Islam telah berkembang sejak masa Rasulullah SAW dan khulafaur rasyidin, namun pada masa Daulah Umayyah sistem pendidikan mulai menunjukkan bentuk yang lebih terstruktur. Periode ini menandai lahirnya lembaga-lembaga pendidikan formal seperti kuttab dan masjid yang berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat ilmu pengetahuan dan pengembangan masyarakat (Niswah dkk., 2025). Transisi ini menunjukkan bahwa pendidikan telah menjadi instrumen sosial dan politik yang memperkuat stabilitas umat Islam.

Dalam konteks sejarah pendidikan Islam, masa Daulah Umayyah penting dikaji karena berhasil mengintegrasikan antara ilmu keagamaan dan ilmu rasional, sekaligus memperluas akses terhadap pendidikan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan politik dan kebijakan pendidikan memiliki hubungan timbal balik dalam membentuk kemajuan peradaban Islam (D. Efendi & Iswantir, 2023). Melalui sinergi antara otoritas pemerintahan dan peran ulama, proses pendidikan tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu, tetapi juga pada pembentukan karakter dan etika sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Daulah Umayyah terhadap pembentukan sistem pendidikan Islam yang terorganisir, pengembangan lembaga-lembaga pendidikan, serta peranannya dalam memperkuat tradisi intelektual yang menjadi fondasi bagi peradaban Islam selanjutnya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur untuk mengkaji karakteristik pemikiran dan sistem pendidikan Islam pada masa Daulah Umayyah. Pendekatan ini bertujuan memahami fenomena pendidikan secara alami dan kontekstual, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam menafsirkan makna dari data yang bersifat historis dan tekstual (Sugiyono, 2018). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah, seperti jurnal bereputasi, buku teks, artikel akademik, dan karya klasik yang relevan dengan tema pendidikan Islam pada periode Umayyah. Pemilihan sumber didasarkan pada kredibilitas penulis, relevansi isi dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan melalui analisis isi dokumen (content analysis) dan pendekatan historis (historical approach). Teknik ini digunakan untuk menelaah makna, konteks, dan kontribusi gagasan pendidikan pada masa tersebut secara mendalam. Dengan demikian, metode ini tidak hanya menggambarkan fakta sejarah, tetapi juga menafsirkan dinamika intelektual dan kebijakan pendidikan Islam yang berkembang pada era Umayyah secara sistematis dan kritis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Daulah Umayyah memiliki dampak yang signifikan terhadap lahirnya budaya ilmiah dalam peradaban Islam. Dalam artikel yang ditulis oleh Syah dkk, pemerintah pada masa ini menyadari pentingnya ilmu pengetahuan sebagai pilar peradaban dan kekuatan politik, sehingga berbagai kebijakan diarahkan untuk mendukung kegiatan keilmuan (Syah dkk., 2025). Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pendirian lembaga-lembaga pendidikan seperti kuttab, masjid, dan istana yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan ilmu. Selain itu, para khalifah memberikan penghargaan kepada ulama, cendekiawan, dan penyair yang berkontribusi dalam pengembangan ilmu dan kebudayaan (Niswah dkk., 2025). Dukungan politik dan finansial terhadap aktivitas keilmuan inilah yang menjadi fondasi bagi tumbuhnya tradisi ilmiah yang kuat di dunia Islam.

Kebijakan administratif yang diterapkan oleh para khalifah Umayyah, seperti Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz, turut memperkuat basis budaya ilmiah. Reformasi birokrasi yang dilakukan melalui pembentukan lembaga diwan tidak hanya menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, tetapi juga membuka ruang bagi berkembangnya ilmu administrasi, bahasa, dan hukum. Dalam artikel yang ditulis oleh Fu'ad dkk, bahwa penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara pada masa daulah umayyah mempercepat proses standardisasi pengetahuan dan komunikasi ilmiah di seluruh wilayah kekuasaan

Islam (Fu'ad dkk., 2024). Hal ini menjadikan bahasa Arab tidak hanya sebagai alat politik, tetapi juga sebagai medium utama dalam penyebaran ilmu pengetahuan di berbagai disiplin, mulai dari teologi hingga sains terapan.

Selain kebijakan administratif, Daulah Umayyah juga memberikan kontribusi besar terhadap penguatan jaringan intelektual. Pemerintah mendorong pertukaran ilmu melalui interaksi antara ulama dari berbagai daerah seperti Damaskus, Kuffah, Basrah, dan Kairo (Nur, 2015). Aktivitas ilmiah di masjid-masjid besar mendorong lahirnya tradisi diskusi, debat ilmiah (mujadalah), dan kajian tafsir serta hadis secara sistematis. Tradisi ini menumbuhkan budaya berpikir kritis dan analitis di kalangan cendekiawan Muslim. Dengan adanya dukungan penguasa, kegiatan ilmiah tidak hanya terbatas pada bidang keagamaan, tetapi juga meluas ke bidang kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat, yang kemudian menjadi ciri khas peradaban Islam klasik.

Kebijakan yang berpihak pada ilmu pengetahuan tersebut menunjukkan bahwa Daulah Umayyah bukan hanya kekuatan politik, tetapi juga aktor penting dalam proses institusionalisasi ilmu (Hazim dkk., 2025). Pemerintah memberikan ruang bagi sintesis antara ilmu agama dan ilmu rasional, yang menjadi ciri khas budaya ilmiah Islam selanjutnya. Budaya ilmiah yang lahir pada masa ini kemudian diteruskan dan disempurnakan pada masa Daulah Abbasiyah, yang melahirkan pusat-pusat keilmuan besar seperti Bayt al-Hikmah (Naimah dkk., 2025). Dengan demikian, kebijakan pendidikan dan politik intelektual Daulah Umayyah telah menjadi batu pijakan penting bagi terbentuknya tradisi ilmiah yang berakar kuat pada nilai-nilai Islam dan rasionalitas ilmiah.

Kebijakan ilmiah yang telah dirintis oleh Daulah Umayyah menemukan bentuk penyempurnaannya. Pada masa Abbasiyah, lembaga-lembaga seperti Bayt al-Hikmah di Baghdad memperluas tradisi intelektual yang sebelumnya tumbuh di Damaskus (Hasanah, 2022). Namun, akar dari kemajuan ini sesungguhnya telah diletakkan oleh Umayyah melalui pembentukan sistem pendidikan, birokrasi keilmuan, serta pembakuan bahasa Arab sebagai bahasa ilmu. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada orientasi kebijakan: Daulah Umayyah lebih berfokus pada konsolidasi politik dan integrasi sosial umat, sedangkan Daulah Abbasiyah menekankan institusionalisasi ilmu pengetahuan melalui riset dan penerjemahan karya-karya filsafat Yunani serta pengembangan sains empiris (Riyadi, 2022). Dengan demikian, hubungan keduanya bersifat evolutif — di mana Umayyah menjadi fondasi struktural, dan Abbasiyah menjadi fase elaboratif bagi peradaban Islam.

Selain itu, kemajuan pada masa Abbasiyah menunjukkan bagaimana budaya ilmiah yang dimulai sejak Umayyah berkembang menjadi tradisi akademik yang mapan. Pola patronase ilmiah yang diterapkan Abbasiyah merupakan kelanjutan dari kebijakan penghargaan terhadap ulama dan cendekiawan yang telah dimulai sebelumnya (Arsyad dkk., 2024). Perbandingan ini memperkuat argumentasi bahwa transformasi ilmu dalam Islam tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui kesinambungan historis yang berpijak pada sistem politik dan pendidikan yang dibangun sejak masa Daulah Umayyah.



### ***Integrasi Teori Peradaban Islam***

Dalam perspektif teori peradaban Islam, pemikiran Ibn Khaldun dapat digunakan untuk menjelaskan dinamika hubungan antara kekuasaan dan ilmu pada masa Umayyah. Ibn Khaldun dalam Muqaddimah menegaskan bahwa kemajuan suatu peradaban ditentukan oleh kekuatan sosial ('asabiyyah) dan kemampuannya mengelola ilmu sebagai sarana mempertahankan stabilitas politik, upaya kolektif yang berkelanjutan dan moral masyarakat (Efendi, 2024). Kebijakan Daulah Umayyah dalam mendukung pendidikan dan mengembangkan sistem birokrasi keilmuan mencerminkan kesadaran kolektif untuk menjadikan ilmu sebagai pilar peradaban.

Dalam pemikiran Ibn Khaldun, 'asabiyyah dipahami bukan sekadar semangat kesukuan, tetapi kekuatan sosial yang menjadi dasar terbentuknya kekuasaan dan keberlangsungan peradaban (Bahri & Musa, 2022). Ia menegaskan bahwa peradaban Islam bertahan karena adanya solidaritas kolektif yang berpadu dengan nilai moral dan agama. 'Asabiyyah yang sejati lahir dari nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial yang berlandaskan pada prinsip kebenaran dan keadilan (Fadhilah & Adibah, 2018). Sebaliknya, 'asabiyyah yang didasari fanatisme buta terhadap suku atau kelompok dinilai sebagai penyebab kehancuran suatu peradaban. Dengan demikian, Ibn Khaldun memandang bahwa kekuatan sosial yang dipandu oleh moralitas agama merupakan inti dari stabilitas politik dan kemajuan umat Islam (Bahri & Musa, 2022).

### **Pembahasan**

#### ***Sejarah Singkat Berdirinya Daulah Umayyah***

Setelah berakhirnya perang Shiffin, umat Islam memasuki fase baru yang ditandai dengan persatuan yang dilakukan oleh cucu Rasulullah SAW, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, pada tahun 41 H. Peristiwa ini menjadi akhir dari era Khulafaurrasyidin dan awal terbentuknya Daulah Umayyah (Katsir, 2021). Dengan kebesaran jiwa Hasan bin Ali, kepemimpinan diserahkan kepada Mu'awiyah bin Abi Sufyan untuk menjaga kesatuan umat Islam. Penyerahan kekuasaan ini tidak hanya menjadi titik awal stabilitas politik umat Islam, tetapi juga membuka jalan bagi lahirnya sebuah pemerintahan yang terorganisir dan berpengaruh besar dalam sejarah Islam, yaitu Daulah Umayyah. Daulah ini didirikan oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan pada tahun 661 M dan berlangsung hingga 750 M. Masa ini memberikan dampak besar terhadap perkembangan peradaban Islam (Guzmán, 2004).

Hampir semua para sejarawan membagi Daulah Umayyah menjadi dua. Pertama, Daulah umayyah yang dirintis dan didirikan oleh Mua'wiyah bin Abi Sufyan yang berpusat di Damasuks. Kedua daulah Umayyah di Andalusia (Adhim, 2021). Daulah Umayyah berkuasa kurang lebih 91 tahun sejak 41 H hingga 132 H, dengan 14 orang khalifah dan periode Daulah Umayyah dibagi menjadi 3 masa, yakni permulaan, perkembangan/kejayaan, dan keruntuhan. Masa permulaan ditandai dengan usaha-usaha Muawiyah meletakkan daasar-dasar pemerintahan dan orientasi kekuasaan: perampasan kota Madinah, penyerbuan kota Mekkah pada masa Yazid I, dan perselisihan antara suku-suku arab pada masa Muawiyah

II. Masa kejayaan dimulai pada masa pemerintahan Abdul Malik. Ia dianggap sebagai pendiri daulah bani Umayyah kedua karena mampu mencegah disintegrasi yang terjadi sejak masa Marwan. Pemerintahan yang dipegang oleh Abdul Malik berhasil menyempurnakan administrasi pemerintahan Bani Umayyah. Masa kejayaan dan keemasan berakhir pada masa Umar bin Abdul Aziz, masa pemerintahannya hanya sekitar 2 tahun 5 bulan. Namun, masa keemasan daulah Umawiyah berada di masa Umar, Bahkan Umar disetiap malamnya selalu menangis memikirkan umatnya. Dalam majelis Sufyan Tsauri beliau mengatakan bahwa khalifah Rasulullah ada 5: Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Abdul Aziz (Imawan, 2021).

### ***Perubahan Sistem Pemerintahan***

Salah satu perubahan besar yang dibawa Daulah Umayyah adalah sistem pemerintahan yang berubah dari sistem republik (musyawarah) menjadi sistem monarki. Selama periode ini berlangsung langkah-langkah untuk merekonstruksi otoritas sekaligus kekuasaan khilafah dan menerapkan paham golongan bersama dengan pemerintah. Kemudian, kekuasaan tidak lagi dipilih oleh umat, melainkan diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga. Meskipun demikian, sistem ini juga membawa stabilitas pemerintahan yang cukup memperkuat posisi politik umat Islam. Cara Muawiyah memilih anaknya sebagai penerus khalifah, ini cukup disorot oleh berbagai Sejarawan karena dianggap menyimpang dari pemilihan Khalifah di Era sebelumnya (Rizqullah, 2022).

Bahkan sistem monarki ini juga diterapkan oleh pemerintahan Islam pada masa-masa sesudahnya, misalnya Bani Abbasiyah, Dinasti Fatimiyah, Turki Utsmani, dan sebagainya. Namun akibat sistem pemerintahan ini, Dewan Permusyawaratan dan Dewan Penasihat tidak berfungsi dengan baik. Hal ini dikarenakan tradisi musyawarah dan kebebasan berpendapat tidak lagi ditegakkan. Hak bicara rakyat ditekan dan kritik mereka atas kebijakan pemerintah tidak dapat tersampaikan kepada khalifah secara langsung, tetapi melalui hajib (penjaga pintu).

Selain itu, perubahan struktur kekuasaan pada masa Dinasti Umayyah juga berdampak pada munculnya birokrasi pemerintahan yang lebih terorganisir. Pembentukan lembaga-lembaga seperti diwan (departemen pemerintahan) menunjukkan adanya upaya modernisasi dalam sistem administrasi negara (Azman, 2017). Meski kekuasaan berpusat pada khalifah, namun sistem administrasi ini memungkinkan koordinasi antara pusat dan daerah berjalan lebih efektif. Dengan demikian, Dinasti Umayyah berhasil meletakkan dasar-dasar tata kelola pemerintahan Islam yang terstruktur dan berorientasi pada efisiensi, meskipun di sisi lain nilai-nilai egalitarian dan partisipatif umat mulai mengalami kemunduran.

### ***Kemajuan Peradaban Yang Dicapai***

Kemajuan peradaban yang diraih oleh Daulah Umayyah tidak terlepas dari keberhasilan mereka dalam membangun sistem pemerintahan yang kuat dan terstruktur. Berbagai aspek kehidupan mulai mendapatkan perhatian khusus,

mulai dari tata kelola negara hingga perkembangan budaya dan sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Dinasti Umayyah tidak hanya fokus pada ekspansi wilayah, tetapi juga menaruh perhatian besar terhadap pembangunan internal Administrasi pemerintahan. Berikut ini akan diuraikan beberapa bentuk kemajuan yang berhasil dicapai oleh Daulah Umayyah dalam berbagai bidang:

#### *Bidang Administrasi pemerintahan*

Dinasti umayyah membenyuk beberapa diwan (Departemen) yaitu:

- a. Diwan al Rasail, semacam sekretaris jendral yang berfungsi untuk mengurus surat-surat negara yang ditujukan kepada para gubernur atau menerima surat-surat dari mereka.
- b. Diwan al Kharraj, yang berfungsi untuk mengurus masalah pajak.
- c. Diwan al Barid, yang berfungsi sebagai penyampai berita-berita rahasia daerah kepada pemerintah pusat.
- d. Diwan al Khatam, yang berfungsi untuk mencatat atau menyalin peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah.
- e. Diwan Musghilat, yang berfungsi untuk menangani berbagai kepentingan umum.
- f. Keuangan Percetakan uang dilakukan pada masa khalifah Abdul Malik ibn Marwan, Walaupun pengelolaan asset dari pajak tetap di Baitul Mal

#### *Ketentaraan*

Pada masa ini keluar kebijakan yang agak memaksa untuk menjadi tentara yaitu dengan adanya undang-undang wajib militer yang dinamakan "Nidhomul Tajnidil Ijbary"

#### *Kehakiman*

Kehakiman pada masa ini mempunyai dua ciri khas yaitu:

- a. Seorang qadhi atau hakim memutuskan perkara dengan ijtihad
- b. Kehakiman belum terpengaruh dengan politik.

#### *Sosial budaya*

Pada masa ini orang-orang Arab memandang dirinya lebih mulia dari segala bangsa bukan Arab, bahkan mereka memberi gelar dengan "Al Hamra".

#### *Seni dan sastra*

Ketika Walid ibn Abdul Malik berkuasa terjadi penyeragaman bahasa, yaitu semua administrasi negara harus memakai bahasa Arab.

#### *Seni rupa dan arsitektur*

Seni ukir dan pahat yang sangat berkembang pada masa itu dan kaligrafi sebagai motifnya. Dan juga dibangunnya Kubah al Sakhras di Baitul Maqdis yang dibangun oleh khalifah Abdul Malik ibn Marwan (Anwar, 2015).

### **Masa Keemasan Para Khalifah**

Masa keemasan Daulah Umayyah merupakan kejayaan puncak dari Daulah ini dengan ditandai stabilitas politik, kemajuan ekonomi, perluasan wilayah kekuasaan. Ada dua hal yang menarik dari system pemerintahan yang dibangun oleh Bani Umayyah, yaitu politik ekspansi (perluasan wilayah) dan sistem monarkhi (Monarchiheriditis). Perluasan ini dilandasi oleh semangat dan

keinginan untuk merajai dan berkuasa yang telah berkobar dalam jiwa para khalifah untuk mendatangkan kehebatan bagi negaranya (Tabrani et al.,2023).

Daulah ini juga berhasil membangun Infrastruktur, memperkuat administrasi negarar dengan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan. Daulah Umayyah berkembang terutama dipengaruhi oleh dua faktor penting. Pertama, persentuhan antara budaya Arab muslim dengan budaya Eropa. Kedua, terdapat persentuhan langsung antara budaya Arab muslim dengan budaya Eropa, bangsa Arab mampu mempertahankan tradisi dan budaya mereka, dan ini berlangsung hingga masa-masa akhir kekuasaan Dinasti Abbasiyah (Manshur, 2003).

Kejayaan tersebut tidak lepas dari peran para khalifahnya dengan kebijakan-kebijakan yang efektif. Beberapa khalifah dari daulah ini memiliki catatan sejarah yang menonjol (Cantika, 2025). Setidaknya ada lima khalifah besar yang dikenal, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pendiri dinasti, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz dan Hisyam bin Abdul Malik. Berikut ini merupakan kemajuan-kemajuan oleh kelima khalifah tersebut:

#### **1. Muawiyah bin Abu Sufyan**

Muawiyah bin Abu Sufyan Shahr bin Harb bin Umayyah bin Abu Syams bin Abdu Manaf bin Qushay Al-Qurasyi. Ia masuk Islam bersama Abu Sufyan dan Hindun bin Utbah; kedua orang tuanya ketika Fathu Mekkah. Ayahnya Muawiyah yakni Abu Sufyan, dahulu sangat memusuhi Rasulullah SAW. Namun, setelah memeluk Islam ia membuktikan keIslamannya dengan gigih.

Muawiyah adalah sosok yang pandai, taktis serta ahli siasat. Ia juga mampu dalam menyesuaikan retorika ketika berbicara, terkadang lembut, terkadang tegas. Kemudia, ia juga diamanahi oleh Rasulullah SAW sebagai penulis wahyu. Muawiyah ketika dinobatkan sebagai pemimpin Islam, ia juga mampu membuktikannya dengan prestasi-prestasi penting pada masanya (Imawan, 2021). Ia memerintah dinasti ini sejak tahun 41 H hingga 60 H atau 661-680 M. Beberapa kebijakan besar yang telah dilakukannya dan dikenal luas seperti, memindahkan ibu kota negara yang awalnya di Kota Kufah, Irak menuju Damaskus, Syiria.

Mengganti sistem kekhalifahan khulafaur rasyidin yang menunjuk khalifah berdasarkan musyawarah umat Islam menjadi kerajaan yang mewariskan kepemimpinan berdasarkan garis keturunan. Mendirikan dinas pos untuk melakukan pengiriman barang. Dinas ini dilengkapi dengan pejabat khusus di posisinya dan kuda-kuda di tempat tertentu sebagai alat transportasi. Kepemilikan harta oleh rakyat dipindahkan menjadi milik Allah yang nantinya digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat (Cantika, 2025).

#### **2. Abdul Malik bin Marwan**

Sebagai khalifah kelima, Abdul Malik bin Marwan memimpin dinasti Umayyah pada tahun 65-86 H / 684-705 M. Khalifah Abdul Malik berjasa membangun kembali Daulah Umayyah setelah sempat tergoncang akibat konflik yang terjadi pada masa khalifah sebelumnya. Di bawah pemerintahannya beberapa perkembangan tercapai sepererti, mencetak mata uang sendiri yang bertuliskan huruf Arab. Langkah ini dilakukan untuk menggantikan mata uang yang dicetak



oleh Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Persia di daerah yang telah dikuasai Islam. Mendirikan pabrik kapal di wilayah Tunisia untuk memperkuat kekuatan angkatan laut. Membentuk Mahkamah Khusus yang menangani pegawai pemerintah dan pembantu kerajaan yang melakukan kesalahan. Memperbaiki sistem kerja dinas pos dengan memperbanyak ekspedisi pos sehingga sistem kerjanya lebih teratur dan dapat diandalkan, Mendirikan bangunan yang indah megah di dalam negeri (Cantika, 2025).

### 3. Al-Walid bin Abdul Malik

Al-Walid bin Abdul Malik, khalifah keenam Dinasti Umayyah, dikenal sebagai sosok pembawa masa keemasan dengan berbagai prestasi penting selama masa pemerintahannya (705–715 M). Khalifah al-Walid naik di kala negara dalam kondisi yang stabil pasca kepemimpinan ayahnya. Hal ini berhasil ia manfaatkan dengan baik dengan mempertahankan serta mengembangkan apa yang sudah ada, seperti dalam hal administrasi, kemakmuran ekonomi, dan pembangunan infrastruktur (Zein, 2022).

### 4. Umar Bin Abdul Aziz

Khalifah Umar bin Abdul Aziz dijuluki sebagai Umar II karena secara nasab memiliki pertalian darah dengan khalifah Umar bin Khattab. Dari jalur ibunya, Umar bin Abdul Aziz merupakan cicit dari sahabat utama Nabi Muhammad SAW tersebut. Tidak hanya dekat dengan pertalian darah, kesalehan Umar bin Abdul Aziz juga tidak jauh berbeda dengan pendahulunya (Cantika, 2025).

Kelahiran Umar bin Abdul Aziz merupakan anak yang telah diramalkan dalam mimpi Umar bin Khattab (kakeknya). Dalam mimpi itu diceritakan tentang adanya salah seorang dari keturunan mempunyai luka pada wajahnya, nama adalah Umar. Mimpi itu terpendam selama 40 tahun sebelum cucunya bernama Umar bin Abdul Aziz. Dalam mimpi itu juga disebutkan bahwa, “Bila ada keturunan Umayyah yang memiliki bekas luka di wajah. Engkaulah orang yang berbahagia” (Azman, 2017).

Khalifah Umar bin Abdul Aziz, meskipun singkat masa pemerintahannya, tetapi memiliki jasa besar dalam memperbaiki sisi lemah dari para khalifah Umayyah sebelumnya. Kekuatan utamanya adalah ketauladanan, keadilan, dan dakwah. Dengan keshalehan, kefaqihan (kepahaman yang baik dalam hal ilmu agama), serta kezuhudan menjadikannya sebagai tauladan yang sangat dicintai rakyat, dan pula dihormati oleh golongan oposisi (Syi’ah dan Khawarij) (Zein, 2022). Kesejahteraan rakyat benar-benar terjamin. Ada laporan tentang aset zakat yang tidak disalurkan karena tidak ada orang yang membutuhkan yang berhak mengambilnya. Kekhalifahan Islam memiliki distribusi kekayaan yang relatif merata, tidak hanya di Afrika, tetapi lebih jauh lagi di Basrah dan Irak. Sejak awal menjabat, Dia segera mencabut keuntungan dari Daulah Umayyah, termasuk tanah garapan dan lain-lain, yang telah mereka peroleh melalui penyalahgunaan kekuasaan dan melanggar hukum (Salma & Rusyana, 2023). Umar bin Abdul Aziz mengikuti sunnah Nabi dalam hal penarikan zakat, beliau menunjuk para petugas yang amanah dan dapat dipercaya, kemudian menyuruh mereka untuk menarik

harta yang diwajibkan untuk di zakatkan tanpa berlebih-lebihan atau bahkan mendzalimi (Ulhaq, 2020).

Ketika Islam semakin meluas dan pada babakan berikutnya mulai banyak pemalsuan hadis, maka penulisan hadis mulai dibutuhkan untuk mengkodifikasi hadis pada masa Umar menjadi khalifah. Latar belakang kehidupan Umar di Medinah kemudian yang membuat dirinya menginstruksikan pengumpulan hadis di masa kekhalifahannya. Sedangkan murid-muridnya antara lain, Ibrahim bin Abi Ublah Syamr bin Yaqzan bin Umar bin Abdullah, Abu Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm, Ishaq bin Rusyd, Ismail bin Abu Hakim, Ayyub bin Abu Tamimah Kaisan, Ja'far bin Barqan, Hamid bin Abu Hamid, Daud bin Abi Hindun, Yahya bin Atiq, Sahm bin Yazid, dan lain-lain (Qudsy, 2003).

#### 5. Hisyam bin Abdul Malik

Hisyam bin Abdul Malik adalah khalifah ke-10 dari Dinasti Umayyah yang memerintah dari tahun 724 hingga 743 Masehi. Ia merupakan putra dari Abdul Malik bin Marwan, salah satu tokoh besar dalam konsolidasi kekuasaan Umayyah. Hisyam dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, tegas, dan berwawasan luas dalam mengatur pemerintahan. Khalifah Hisyam bin Abdul Malik berjasa sebagai khalifah terakhir yang menjaga eksistensi Dinasti Umayyah. Hal ini salah satunya ia lakukan dengan kemajuan administrasi yang capai melalui program pencatatan yang rapih dan profesional (Zein, 2022).

### Perkembangan Ilmu dan Pendidikan

Pendidikan Islam telah berlangsung sejak masa awal penyebarannya, dengan masjid berperan sebagai pusat utama kegiatan belajar yang bersifat nonformal (Adnan, 2025). Pemerintah Dinasti Umayyah menaruh perhatian dalam bidang pendidikan. Memberikan dorongan yang kuat terhadap dunia pendidikan dengan penyediaan sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan agar para ilmuwan, para seniman, dan para ulama mau melakukan pengembangan bidang ilmu yang dikuasainya serta mampu melakukan kaderisasi ilmu. Ilmu pengetahuan mengalami perkembangan pesat pada masa ini yaitu Ilmu agama seperti al-Qur'an, tafsir, hadits, dan fiqh dikaji secara mendalam. Di samping itu, ilmu bahasa Arab, sejarah, geografi, hingga ilmu asing seperti filsafat, kedokteran, kimia, astronomi, dan matematika juga berkembang pesat (Anwar, 2015). Perkembangan pesat berbagai cabang ilmu ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan ilmu dalam pandangan Islam. Sebagaimana firman Allah SWT:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Artinya: "Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. (Q.S Az-Zumar Ayat 11)

Ayat tersebut menegaskan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam Islam, karena melalui ilmu manusia dapat mengenal Tuhan, memahami alam semesta, dan menata kehidupan secara lebih baik. Kesadaran inilah yang menjadi dasar bagi kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Daulah

Umayyah. Perkembangan ini menunjukkan bahwa masa Dinasti Umayyah menjadi fondasi penting bagi kemajuan peradaban Islam, khususnya dalam membangun tradisi keilmuan yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Umayyah juga ditandai dengan meningkatnya kegiatan penerjemahan karya-karya ilmiah dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab (Sholihah, 2019). Proses ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan umat Islam, tetapi juga melahirkan sintesis baru antara ilmu rasional dan nilai-nilai wahyu. Para ilmuwan Muslim tidak sekadar menyalin, melainkan juga mengkritisi, mengembangkan, serta menyesuaikannya dengan prinsip-prinsip tauhid. Dengan demikian, ilmu pengetahuan pada masa ini menjadi wahana untuk memperkuat peradaban Islam yang berlandaskan pada integrasi antara akal, wahyu, dan etika keilmuan.

Tidak hanya itu, lembaga-lembaga pendidikan seperti kuttab, masjid, dan bimaristan turut berperan penting dalam mencetak generasi intelektual Muslim yang unggul. Melalui sistem pendidikan berlapis dari dasar hingga tinggi, umat Islam memperoleh kesempatan luas untuk menuntut ilmu sesuai minat dan keahliannya. Tradisi belajar yang terbuka, semangat ilmiah, serta dukungan dari pemerintah menjadikan masa Dinasti Umayyah sebagai tonggak kebangkitan intelektual Islam yang kemudian dilanjutkan dan disempurnakan pada masa Dinasti Abbasiyah.

### **Sistem dan Lembaga Pendidikan**

Perkembangan sistem dan lembaga pendidikan pada periode ini tidak terlepas dari kemajuan politik, ekonomi, dan sosial yang dicapai oleh pemerintahan Umayyah. Stabilitas pemerintahan dan perluasan wilayah kekuasaan memberikan peluang besar bagi penyebaran ilmu pengetahuan dan pembentukan lembaga-lembaga pendidikan yang lebih terstruktur. Pendidikan tidak lagi hanya berlangsung secara informal di rumah atau masjid, tetapi mulai diarahkan pada sistem yang lebih terorganisir dengan adanya guru, murid, kurikulum, serta tempat belajar yang memiliki fungsi sosial dan keagamaan. Dalam perkembangan sistem tersebut, peran guru pun mengalami perluasan makna tidak hanya sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai figur yang membentuk arah moral dan budaya peserta didik. Guru tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis dalam kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga sebagai teladan moral dan penjaga budaya yang berperan menanamkan serta mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keislaman pada setiap peserta didik (Sihab dkk., 2025). Pada periode Dinasti Umayyah terdapat dua jenis pendidikan (Irfani, 2023):

#### **1. Pendidikan khusus untuk anak-anak istana dan para bangsawan**

Yaitu pendidikan yang diselenggarakan dan diperuntukan bagi anak-anak khalifah dan anak-anak para pembesarnya. Tempat Proses pembelajaran berada dalam lingkungan istana. Materi yang diajarkan diarahkan untuk kecakapan memegang kendali pemerintahan atau hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan dengan keperluan dan kebutuhan pemerintahan, sehingga dalam penentuan dan penetapan kurikulumnya bukan hanya oleh guru melainkan orang tua pun turun

menentukannya. Adapun Materi yang diberikan yaitu materi membaca dan menulis al-Quran, al-Hadits, bahasa arab dan syair-syair yang baik, sejarah bangsa Arab dan peperangannya, adab kesopanan, pelajaran-pelajaran keterampilan, seperti menunggang kuda, belajar kepemimpinan berperang. Pendidik atau guru-gurunya dipilih langsung oleh khalifah dengan mendapat jaminan hidup yang lebih baik. Peserta didik atau Anak-anak khalifah dan anak-anak pembesar (Nurlaila et al.,2023).

## 2. Pendidikan umum bagi rakyat, yang ditangani oleh para ulama

Proses pendidikan ini merupakan kelanjutan dari pendidikan yang telah diterapkan dan dilaksanakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup. Sehingga kelancaran proses pendidikan ini ditanggungjawab oleh para ulama, merekalah yang memikul tugas mengajar dan memberikan bimbingan serta pimpinan kepada rakyat. Mereka bekerja atas dasar kesadaran moral serta tanggung jawab agama bukan dasar pengangkatan dan penunjukan pemerintah, sehingga mereka tidak memperoleh jaminan hidup (gaji) dari pemerintah. Jaminan hidup mereka tanggungjawab sendiri dengan pekerjaan lain diluar waktu mengajar, atau ada juga yang menerima sumbangan dari murid-muridnya (Irfani, 2023).

**Table 1: Lembaga-Lembaga Pendidikan pada Masa Dinasti Umayyah**

| No | Lembaga Pendidikan | Fokus Pembelajaran                                                                                                        |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kuttab             | Merupakan lembaga pendidikan dasar yang mengajarkan kemampuan membaca, menulis, dan menghafal Al-Qur'an kepada anak-anak. |
| 2  | Masjid             | Berfungsi sebagai pusat pendidikan menengah dan tinggi; tempat belajar ilmu agama, tafsir, hadis, fikih, dan ilmu bahasa. |
| 3  | Majelis Sastra     | Menjadi forum bagi para penyair dan cendekiawan untuk mempelajari dan mengembangkan sastra, bahasa, serta seni.           |
| 4  | Istana             | Menyediakan pelatihan administratif dan pemerintahan bagi calon pejabat serta sekretaris khalifah.                        |
| 5  | Bimaristan         | Berperan sebagai rumah sakit sekaligus pusat pembelajaran ilmu kedokteran dan farmasi.                                    |
| 6  | Badiah             | Menjadi tempat pembelajaran mendalam bahasa Arab murni serta pelatihan retorika dan sastra.                               |
| 7  | Perpustakaan       | sebagai pusat penyimpanan naskah, dokumentasi, dan sumber ilmu pengetahuan yang dapat diakses oleh ulama serta pelajar.   |

Pada masa Dinasti Umayyah Lembaga pendidikan bersifat Desentralisasi yaitu Pendidikan yang tidak hanya terpusat di ibu kota tetapi sudah dikembangkan secara otonom di daerah yang sudah dikuasai. Kajian keilmuan ini berpusat di Damaskus, Kufah, Madinah, Mesir, Cordova dan beberapa kota lain. Nilai-nilai yang dapat diangkat dari berkembangnya bidang pendidikan di Damaskus pada masa Daulah Umayyah adalah nilai moral, prinsip dan tujuan pendidikannya adalah untuk menyebarkan agama ke seluruh penjuru daerah kekuasaan tanpa paksaan. Pada masa itu berhasil memahami alQur'an dan hadis secara cerdas dan cerdik (Rahayu & Roza, 2023).

### Faktor Runtuhnya Daulah Umayyah

Kemunduran Daulah Bani Umayyah tidak terlepas dari masa pembentukannya. Karena kala itu merupakan awal cikal bakal berkembangnya beberapa faktor penyebab kemunduran dan kehancuran tersebut (Yusra, 2012). Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan Daulah Umayyah:

1. Sistem monarki yang menimbulkan konflik internal. Sistem ini merupakan sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan pada aspek senioritas. Pengaturan system yang abstrak memicu terjadinya persaingan antara anggota keluarga Daulah Umayyah
2. Latar belakang terbentuknya Daulah Umayyah tidak dapat dipisahkan dari konflik yang terjadi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib serta golongan Syi'ah dan Khawarij yang selalu menjadi gerakan oposisi, yang mana dapat menguras kekuatan pemerintahan.
3. Adanya pertentangan etnis antara suku Arabia Utara (Bani Qays) dan Arabia Selatan (Bani Kalb) yang sudah ada sejak sebelum datangnya Islam. Di samping itu golongan Mawali (Non Arab) tidak puas dengan statusnya yang selalu dinomorduakan. Apalagi sikap angkuh bangsa Arab.
4. Gaya hidup mewah di lingkungan Istana yg menjadikan anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan saat diwarisi kekuasaan, dan pada akhirnya masyarakat kecewa akan sikap mereka. Namun, penyebab utama runtuhnya Daulah Umayyah yaitu kemunculan kekuatan baru dari keturunan Bani Abbas dan didukung oleh Bani Hasyim, Syiah serta Mawali (Adhim, 2021).

### SIMPULAN

Masa pemerintahan Daulah Umayyah merupakan fase penting dalam sejarah peradaban Islam yang tidak hanya dalam perluasan wilayah kekuasaan, tetapi juga dalam penguatan sistem pemerintahan, pendidikan, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Perubahan dari sistem republik menjadi monarki membawa dampak signifikan dalam stabilitas politik umat Islam saat itu. Kemajuan yang dicapai Daulah Umayyah meliputi berbagai aspek seperti administrasi pemerintahan, ekonomi, ketentaraan, hukum, serta seni dan budaya. Dalam bidang pendidikan, Daulah Umayyah memberikan kontribusi besar dengan membentuk kurikulum yang mencakup ilmu agama, bahasa Arab, hingga ilmu sains dan



kedokteran. Lembaga pendidikan seperti kuttab, masjid, istana, dan bimaristan menjadi wadah pembelajaran yang aktif.

Meski mencapai banyak kemajuan, Daulah Umayyah akhirnya mengalami kemunduran dan runtuh akibat konflik internal, ketimpangan sosial antara Arab dan non-Arab, serta gaya hidup mewah di kalangan elit istana. Namun demikian, warisan intelektual dan pendidikan yang ditinggalkan tetap menjadi fondasi penting bagi perkembangan dunia Islam di masa-masa berikutnya. Saran dapat berupa masukan bagi peneliti berikutnya, dapat pula rekomendasi implikatif dari temuan Penelitian. Pemerintah dan institusi pendidikan Islam masa kini memang harus bisa mengadopsi prinsip-prinsip pendidikan pada masa Daulah Umayyah, seperti integrasi antara ilmu agama dan sains, serta sistem pembelajaran berbasis masjid dan kuttab, supaya dapat membangun generasi yang unggul secara intelektual dan spiritual.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adhim, F. (2021). *Sejarah peradaban Islam* (Cet. 1). Literasi Nusantara.
- Adnan, I. M., Marsono, Prasetya, H. B., & Faqih, M. R. (2025). Holistic Islamic education: A study of the thought of Imam Al-Ghazali and Muhammad Abduh. *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam*, 5(1), 72–90. <https://doi.org/10.38073/aljadwa.3360>
- Anwar, A. M. (2015). Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. *Tarbiya: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 1(1), 47–76.
- Arsyad, M. M., Kasban, M. Z., & Rama, B. (2024). Dinasti Abbasiyah: Biografi khalifah, kebijakan politik, pengaruh, dan kegemilangan peradaban Islam. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(1), 85–98. <https://doi.org/10.56799/jim.v4i1.6276>
- Azman, Z. (2017). Strategi dakwah Umar bin Abdul Aziz dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam. *El Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 13(2), 1–21. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v13i2.4>
- Cantika, Y. (2025). Mengenal sejarah, masa kejayaan, dan pendiri Dinasti Umayyah. *Gramedia Blog*. <https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-dinasti-umayyah/>
- Efendi, D., & Iswantir, I. (2023). Interelasi pendidikan agama Islam dan politik di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 2(1), 31–38. <https://doi.org/10.31004/jpion.v2i1.94>
- Efendi, Z. (2024). Ibnu Khaldun dan teori peradaban: Relevansi pemikirannya dalam dunia modern. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(6), 2198–2210.
- Fu'ad, M. S., Wahyudin, D., & Suriani, E. (2024). Bahasa Arab sebagai pilar peradaban: Studi perkembangan bahasa Arab pada masa Dinasti Umayyah II. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 4(4), 522–528. <https://doi.org/10.51878/social.v4i4.3792>
- Hasanah, U. (2022). Islamic intellectual development during the Abbasid dynasty (750 AD–861 AD). *El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.24042/jhcc.v3i1.11700>

- Hazim, M., Firmansyah, H., Zuhri, M. T., & Munawaroh, N. (2025). Pemikiran dan peradaban Islam Dinasti Umayyah dan Abbasiyah: Kajian historis dan relevansi warisan intelektual dan peradaban Islam dalam dunia kontemporer. *Al-Muaddib: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 7(2), 629–642. <https://doi.org/10.46773/muaddib.v7i2.1794>
- Imawan, D. H. (2021). *Daulah Umayyiah dan Daulah Abbasiyah*. Universitas Islam Indonesia.
- Irfan Maulana, A. (2025). Revitalisasi metode mudzakah dalam meningkatkan pembelajaran yang interaktif. *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan*, 3(2), 23–35. <https://doi.org/10.59031/jkppk.v3i2.615>
- Irfani, F. (2023). Pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah: Metode, pola, dan locus keilmuan. *At-Ta'dib*, 7(3). <https://doi.org/10.32832/at-tadib.v7i3.19480>
- Katsir, I. (2024). *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (Edisi terjemahan, Cet. ke-9). Insan Kamil.
- Naimah, R. Y., Afrizal, A., & Sawaluddin, S. (2025). Bani Abbas: Kemajuan ilmu, ilmu kalam, filsafat, sains. *Global: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.37985/global.v2i1.68>
- Niswah, C., Maharani, J., Nisyah, A. K., & Ningrum, D. A. (2025). Pendidikan Islam Bani Umayyah I: Jejak awal institusi dan intelektual Muslim. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(6), 366–376. <https://doi.org/10.60126/jim.v3i6.1065>
- Nur, M. (2015). Pemerintahan Islam masa Daulat Bani Umayyah (pembentukan, kemajuan, dan kemunduran). *Pusaka: Jurnal Khazanah Keagamaan*, 3(1), 111–126.
- Nurlaila, N., Zalnur, M., & Zulmuqim, Z. (2023). Perkembangan pendidikan Islam pada masa Dinasti Umayyah. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(2), 44–54. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i2.820>
- Rahayu, S., & Roza, E. (2023). Pendidikan Islam di Damascus: Menelusuri pola pendidikan pada masa Dinasti Umayyah. *Instructional Development Journal (IDJ)*, 6(2), 211–221.
- Riyadi, A. S. M. (2022). Dialog antara Islam dan Yunani masa Dinasti Umayyah–Dinasti Abbasiyah. *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities*, 3(1), 40–51. <https://doi.org/10.22515/isnad.v3i1.5306>
- Rizqullah, M. N. (2022). Pembentukan stabilitas politik pada masa awal Dinasti Umayyah. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(5), 4001–4009.
- Sham Shul Bahri, H., & Musa, R. (2022). [The concept of asabiyyah according to Ibn Khaldun] Konsep asabiyyah menurut Ibnu Khaldun. *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer*, 23(1), 145–156. <https://doi.org/10.37231/jimk.2022.23.1.656>
- Shofya, H. S. S., & Rusyana, A. Y. (2023). Kebijakan ekonomi Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan relevansinya terhadap zakat di Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 3(1), 7–14. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1705>
- Sholihah, M. (2019). Rekonstruksi sejarah pemikiran dan peradaban Islam era Dinasti Umayyah dalam pendidikan Islam. *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman*, 10(1), 81–106. <https://doi.org/10.36835/falasifa.v10i1.154>

- 
- Sihab, W., Aziz, F. F., & Adnan, I. M. (2025). The role of teachers in 21st century education. *At-Takwin: Journal of Islamic Education Studies*, 1(1), 9–15.
- Syah, M. K. T., Nurcahya, Y., Putra, M. Z. O., Ahdillah, Z. A. A., & Anwar, R. H. K. (2025). Dinasti Umayyah di Andalusia: Perkembangan ilmu pengetahuan (756–1031 M). *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities*, 6(1), 39–58. <https://doi.org/10.22515/isnad.v6i01.11762>
- Tabrani, A., Sutiyono, A., Khunaifi, A., et al. (2023). *Perkembangan Islam pasca Khulafaur Rasyidin*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Ulhaq, M. Z. (2020). Pengelolaan keuangan publik Islam (Umar bin Abdul Aziz). *Amal: Journal of Islamic Economic and Business*, 2(1), 64–80.
- Usman, M. H., Aswar, & Iskandar, A. (2021). Menuju Indonesia berkemajuan dalam studi peradaban Islam. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 21(1), 39–74. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v21i1.7862>
- Yusalia, H. (2012). Daulah Umayyah: Ekspansi dan sistem pemerintahan monarki hereditas. *Wardah*, 13(2), 135–144.
- Zein, N. (2022). Contribution of the Umayyad dynasty to the development of Islamic civilization (661–750 AD). *El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization*, 3(1), 44–56. <https://doi.org/10.24042/jhcc.v3i1.8532>